

Ringkasan Eksekutif-Global Corruption Barometer 2007

Setelah analisa selama bertahun-tahun yang dilakukan Transparency International (TI) dan lembaga lain, tidak diragukan lagi efek buruk korupsi terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan *Global Corruption Barometer*, TI mengambil satu langkah maju dengan mengevaluasi pendapat masyarakat tentang dimana dan bagaimana dampak korupsi paling terasa. Transparency International Global Corruption Barometer (the Barometer) adalah survei pendapat publik yang telah dilaksanakan di seluruh dunia setiap tahun sejak 2003. Barometer mengkaji bagaimana dampak korupsi terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat awam, menanyakan tentang sikap masyarakat umum terhadap korupsi, seberapa jauh masyarakat percaya korupsi telah mengakar dalam institusi-institusi publik, pengalaman mereka tentang suap kecil-kecilan (*petty bribery*) dan perasaan mereka tentang bagaimana hasil dari usaha memberantas korupsi di masa depan.

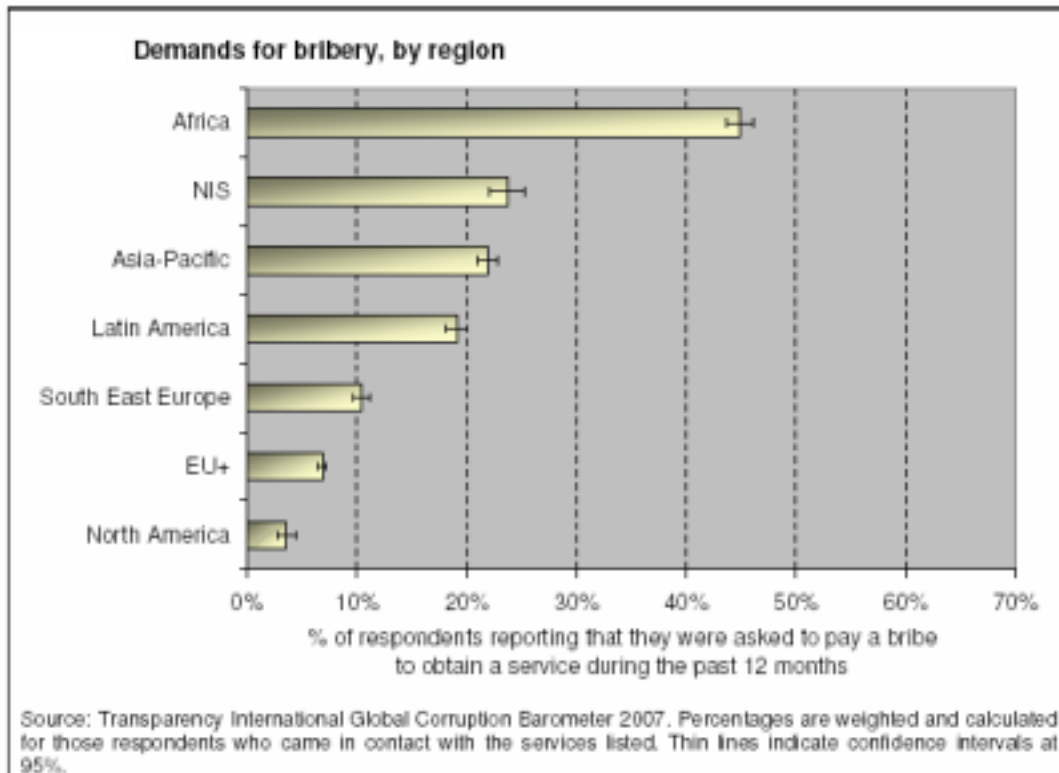
Global Corruption Barometer 2007 mewawancarai 63.199 orang di 60 negara dan wilayah antara bulan Juni sampai dengan September 2007. Survei Barometer dilaksanakan atas nama Transparency International oleh *Gallup International Association* sebagai bagian dari Survei *Voice of the People* miliknya. Global Corruption Barometer 2007 mencakup 7 negara yang tidak termasuk dalam edisi tahun 2006: Bosnia Herzegovina, Kamboja, Ekuador, Ghana, Irlandia Lituania dan Vietnam.

Temuan-temuan kunci Global Corruption Barometer 2007 adalah:

- Masyarakat miskin di negara berkembang maupun di negara maju, adalah kelompok yang paling terkena dampak buruk korupsi. Mereka juga merupakan kelompok masyarakat yang paling pesimis terhadap prospek berkurangnya korupsi di masa depan.
- 1 dari 10 orang di seluruh dunia harus membayar suap untuk mendapatkan pelayanan publik, kasus suap yang dilaporkan meningkat di beberapa wilayah, seperti Asia-Pasifik dan Eropa Tenggara.
- Praktik suap secara khusus menyebar dalam interaksi dengan polisi, lembaga peradilan dan lembaga pelayanan perijinan.
- Publik percaya bahwa partai politik, parlemen, polisi dan lembaga peradilan adalah institusi paling korup dalam negaranya.
- Setengah dari total sampel yang diwawancarai-meningkat secara signifikan dibanding empat tahun yang lalu-menduga korupsi di negaranya akan meningkat dalam tiga tahun ke depan, kecuali beberapa pengecualian di negara-negara Afrika.
- Setengah dari orang yang diwawancarai berpendapat usaha pemerintahnya dalam memerangi korupsi tidak efektif.

Membayar Suap menjadi Hal yang Biasa di Seluruh Dunia

Global Corruption Barometer 2007 mengkaji pengalaman di rumah tangga tentang suap kecil-kecilan. Rata-rata lebih dari satu dari sepuluh orang yang diwawancarai harus membayar suap pada tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan pelayanan publik. Namun pengalaman tentang suap berbeda untuk setiap orang di berbagai tempat di dunia.



Negara-negara yang paling terkena dampak suap skala kecil adalah Albania, Kamerun, Makedonia, Kosovo, Nigeria, Pakistan, Filipina, Rumania dan Senegal.

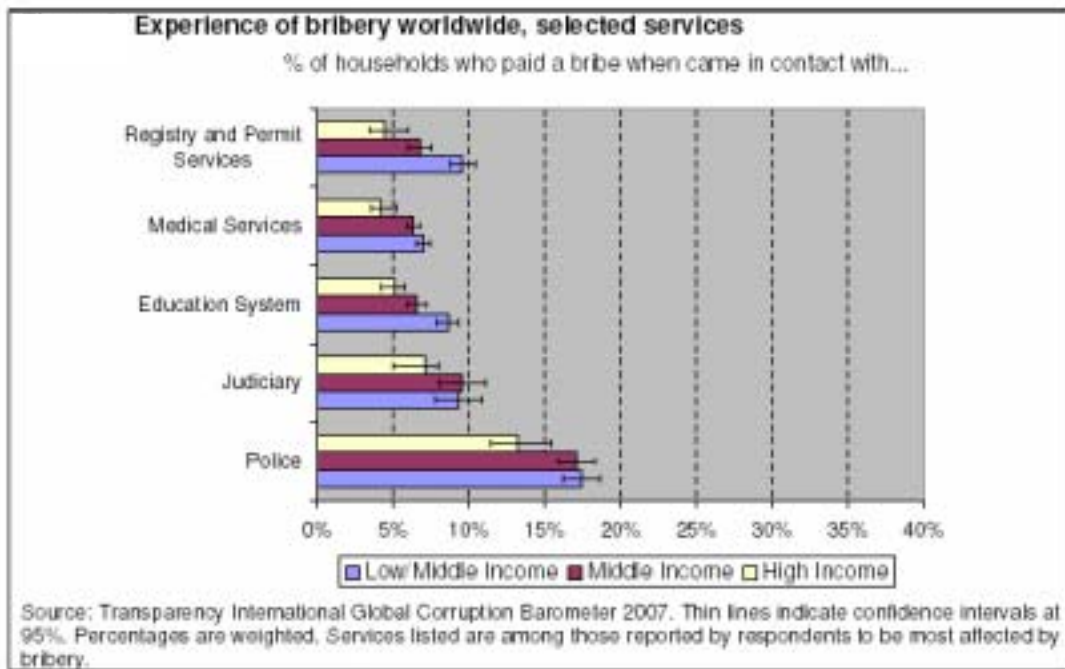
Countries most affected by bribery⁶

	Quintile	Countries/Territories
% of respondents reporting they paid a bribe to obtain a service	Top quintile: More than 30%	Albania, Cambodia, Cameroon, FYR Macedonia, Kosovo, Nigeria, Pakistan, Philippines, Romania, Senegal
	Second quintile: 17 – 20%	Bolivia, Dominican Republic, Greece, India, Indonesia, Lithuania, Moldova, Peru, Serbia, Ukraine
	Third quintile: 8 – 16%	Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Luxembourg, Malaysia, Panama, Russia, Turkey, Venezuela, Vietnam
	Fourth quintile: 4 – 7%	Argentina, Bosnia-Herzegovina, Finland, Hong Kong, Ireland, Portugal, South Africa, Spain, United Kingdom, United States
	Bottom quintile: Less than 3%	Austria, Canada, Denmark, France, Iceland, Japan, South Korea, Netherlands, Sweden, Switzerland

Source: Transparency International Global Corruption Barometer 2007.

Suap: si miskin membayar paling banyak

GCB 2007 menemukan bahwa responden yang berasal dari kelompok berpenghasilan rendah dan menengah dihantam paling kuat oleh efek suap kecil-kecilan, karena merekalah yang paling mungkin terpaksa membayar suap untuk mendapatkan pelayanan public dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelompok berpenghasilan tinggi (Figure 2). Hal ini terjadi di mana saja, tidak peduli apakah mereka berasal dari negara kaya maupun miskin. Mereka yang berpenghasilan lebih kecil harus membayar lebih banyak di seluruh dunia.



Menurut GCB 2007, perempuan cenderung lebih tidak mungkin membayar suap dibandingkan dengan laki-laki. Ini tidak berarti perempuan lebih tidak korup dibanding laki-laki. Laki-laki melaporkan lebih banyak kontak dengan institusi dan pelayanan seperti polisi dan lembaga peradilan, di mana kebutuhan untuk membayar suap lebih mungkin terjadi.

GCB 2007 juga menunjukkan bahwa generasi muda cenderung lebih mungkin membayar suap dibanding orang tua. Eksplorasi hubungan antara usia responden dan pengalaman terhadap suap menunjukkan bahwa 18% dari responden berusia di bawah 30 tahun membayar suap bila diminta, sementara hanya 4% dari responden berusia lebih dari 65 tahun melakukan hal yang sama. Perbedaan ini sebenarnya bisa dijelaskan karena pada faktanya anggota masyarakat yang berusia lanjut jarang melakukan kontak dengan institusi seperti polisi dan lembaga peradilan, di mana tuntutan untuk membayar suap sangat tinggi (Tabel 2)

Percentage of respondents reporting that they paid a bribe to obtain a service

Age Group	% of respondents who paid a bribe
Total Sample	13%
Under 30	18%
30 - 50	13%
51 - 65	8%
65 +	4%

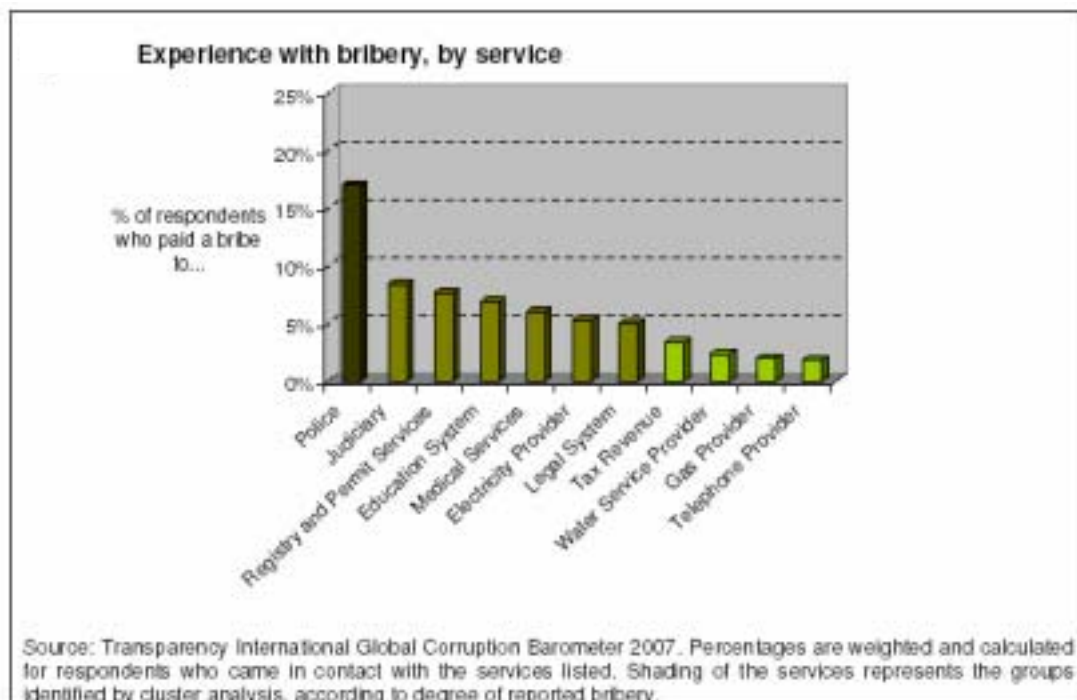
Source: Transparency International Global Corruption Barometer 2007. Percentages are weighted and calculated for respondents who came in contact with services.

Polisi adalah institusi publik yang dilaporkan paling terpengaruh suap skala kecil

Dalam GCB 2007, masyarakat umum ditanyai apakah mereka diminta suap ketika mereka berhubungan dengan kantor pelayanan publik utama seperti sektor pendidikan, kesehatan, lembaga peradilan, kepolisian, lembaga pemberi lisensi dan ijin, pelayanan pajak atau beberapa penyedia kebutuhan umum-telepon, listrik, air bersih dan gas.

Dari sebelas pelayanan tersebut, masyarakat menyatakan bahwa hubungan dengan lembaga kepolisian adalah yang paling bermasalah dalam soal membayar suap. Satu dari empat anggota masyarakat di seluruh dunia yang pernah berhubungan langsung dengan lembaga kepolisian diminta membayar uang pelicin, dan satu dari enam anggota masyarakat mengaku mereka pada akhirnya membayar suap. Suap juga dilaporkan sebagai problem yang berarti di lembaga peradilan, pelayanan ijin dan registrasi, pendidikan, pelayanan kesehatan dan juga pada pelayanan listrik.

Fakta bahwa peradilan muncul sebagai sektor sesudah kepolisian yang paling dipengaruhi oleh suap menimbulkan keraguan besar tentang pengakuan tentang perlindungan hak dasar masyarakat di sebuah negara demokratis untuk mendapatkan hak yang sama dalam pengadilan hukum. Institusi pengadilan dan polisi bertugas dan memiliki kewenangan untuk menindak kegiatan yang berkaitan dengan korupsi. Apabila lembaga-lembaga ini justru terjebak dalam lingkaran suap seperti yang diindikasikan oleh GCB 2007, maka mekanisme penindakan korupsi akan terganggu, dan kepercayaan masyarakat akan rusak.



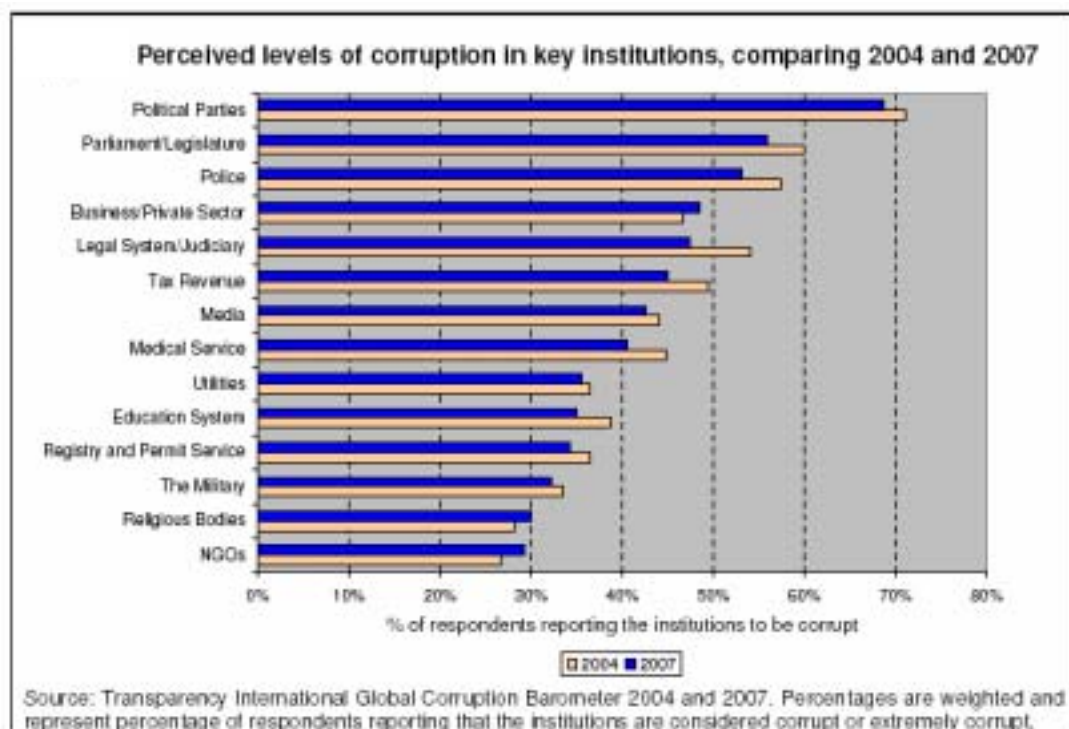
Korupsi di lembaga kunci: partai politik dan lembaga legislatif dilihat sebagai yang paling korup

Seperti dalam edisi sebelumnya, GCB 2007 juga menguji seberapa jauh persepsi masyarakat tentang pengaruh korupsi dalam institusi publik yang utama di negaranya, di samping melihat pengalaman langsung seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Partai politik dan lembaga legislatif, di persepsikan oleh masyarakat di seluruh dunia sebagai institusi yang paling dikotori oleh tindak korupsi.

Berbagai perbedaan timbul dalam pandangan masyarakat tentang korupsi dalam institusi di berbagai negara. Partai politik dianggap sebagai lembaga korup oleh 4 dari 5 responden di Argentina, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Bolivia, Kamerun, India, Jepang, Panama, dan Nigeria, namun tidak lebih dari dua dari lima di Denmark, Belanda, Norwegia, Swedia, Swiss dan Singapura.

Pada umumnya, persepsi masyarakat tentang korupsi di lembaga-lembaga kunci tidak mengalami perubahan secara dramatis selama empat tahun terakhir ini. Namun opini tentang beberapa institusi, seperti sektor swasta, menurun seiring perjalanan waktu. Hal ini berarti masyarakat memiliki pandangan yang lebih kritis tentang peran sektor swasta dalam tindak korupsi saat ini. Bila membandingkan data pada tahun 2004 dan 2007, lebih banyak orang yang berpendapat bahwa NGO juga korup.



Pengalaman versus persepsi tentang korupsi-apakah mereka sejalan?

Pengalaman dan persepsi tentang korupsi yang disampaikan oleh masyarakat dalam GCB 2007 ternyata berhubungan sangat erat. Menurut hasil survei tahun ini, ada hubungan sangat kuat antara persepsi masyarakat tentang korupsi dalam pelayanan publik utama dan pengalaman mereka tentang suap ketika mereka berhubungan dengan institusi yang sama.

Lebih lagi, temuan GCB 2007 menunjukkan korelasi yang kuat antara pengalaman masyarakat dengan suap dan persepsi ahli tentang korupsi (CPI 2007). Hal ini menunjukkan bahwa di negara-negara yang pelaku bisnis, dan analisisnya memiliki persepsi bahwa korupsi merajalela, banyak anggota masyarakat yang membayar suap untuk mendapatkan pelayanan publik. Ini bisa disimpulkan sebagai adanya hubungan antara persepsi ahli dan pengalaman masyarakat publik dalam hal korupsi sektor publik.

